

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

A.1 VISI

Setiap perencanaan strategis memerlukan fokus yaitu visi. Visi dapat dikatakan juga semacam ‘tujuan’ yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) berkontribusi pada pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan. Visi merupakan keadaan ‘ideal’, sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2016, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA,
BERKEADILAN, DAN JAYA ”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan:

1. **Kesejahteraan Rakyat.** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Keadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia
3. **Jaya,** terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

A.2 MISI

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut:

1. **Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan**

Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 – 2010 yaitu Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan dengan Masyarakatnya yang Maju, Aman, Damai, Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, harus terus dilanjutkan. Hakekat visi tersebut adalah menuju terwujudnya masyarakat Kotawaringin Barat yang sejahtera. Hal ini searah

dengan tujuan Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan akhir dari pembentukan Negara Indonesia adalah Kesejahteraan masyarakat.

Momentum pertumbuhan ekonomi kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat mengesankan tumbuh rata rata 6,56 persen periode tahun 2005 – 2009 harus tetap dipertahankan dan terus dipacu lebih tinggi lagi. Dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dimungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat diwujudkan.

Kesejahteraan tidak hanya diukur secara material tetapi juga secara rohani yang memungkinkan masyarakat Kotawaringin Barat menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Kita tidak bisa sekedar menciptakan lapangan kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik secara ekonomi maupun harkat hidup manusia. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural, misalnya pembangunan yang mendorong terciptanya urbanisasi baik akibat kemajuan maupun akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi disamping merefleksikan kemajuan, memberikan pula tugas tambahan bagi pemerintah dalam melayani rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur perkotaan jauh lebih mahal dan kompleks dibandingkan di daerah perdesaan. Karakteristik masyarakat perkotaan yang lebih heterogen, memerlukan fasilitas publik yang makin beragam pula. Pembangunan infrastruktur perhubungan darat dan laut terus ditingkatkan menjawab tuntutan kemajuan ekonomi masyarakat dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian halnya perhubungan darat terutama untuk percepatan akses kecamatan dengan antar desa dan antar wilayah.

2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Kotawaringin Barat yang Sejahtera, adil dan jaya.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi

yang sinergis. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Keberpihakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.

Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama.

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara wilayah pusat pemerintahan/perkotaan dan desa yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional, maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita harus terus melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kita juga harus terus meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, maka peran kaum perempuan di sektor publik harus terus kita tingkatkan. Tentu saja, kita juga harus terus memperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat

Kebijakan pemerintah memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan keunggulan spesifik daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Seluruh potensi Kabupaten Kotawaringin Barat baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, kekayaan budaya, nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat harus dapat menjadi sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan kejayaan masyarakat.

Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan unsur penting proses demokrasi. Dalam lima tahun terakhir ini, menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa, ditandai dengan keberhasilan pemilihan Presiden, DPR, DPD, Bupati, DPRD, telah dipilih langsung oleh rakyat.

Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis perlu terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Karena itulah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan jaya,

A.3 TUJUAN DAN SASARAN

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi akan selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi pun, akan bertambah banyak, sementara kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah harus realistis dan harus menghindari diri dari membuat janji-janji yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Disadari bahwa banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian suatu rencana pembangunan. Faktor eksogen, bisa mempermudah pencapaian atau sebaliknya ia dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian.

Tidak ada yang akan mampu memperkirakan kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut. Walaupun demikian, beberapa perubahan eksogen ini dapat dikendalikan. Sebagian dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat. Upaya keras dan langkah antisipasi yang tepat akan menjadi tekad pemerintah yang akan datang untuk mencapai sasaran yang disebutkan di bawah ini.

1. Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

Pemerintah daerah akan bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi selama lima tahun kedepan. Diharapkan dengan momentum pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir rata rata 6,56 persen dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 4 – 4,5 persen pada akhir tahun 2016. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi sekitar 4 – 5 persen pada akhir 2016.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain di tandai oleh; (a) menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf; (b) meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pemantapan rintisan program belajar pendidikan lanjutan 12 tahun ; dan (c) Berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara di bidang kesehatan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Dalam bidang pangan, terciptanya kemandirian dalam bidang pangan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat, berupa; (a) perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan; (b) membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan; (c) meningkatnya produksi beras dan komoditas pangan utama lainnya; (d) menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah; (e) menjaga nilai tukar agar petani dapat menikmati kemakmuran;

Di bidang energi, sasaran lebih ditujukan untuk pengembangan energi listrik di kecamatan dan pedesaan terpencil. Di bidang lingkungan hidup yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting lingkungan hidup.

Dalam bidang infrastruktur, meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis di bidang pengembangan produk, pemasaran, pelaksanaan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dan menjaga fungsi dan keberadaan serta efisiensi pasar tradisional.

2. Perkuatan Pembangunan Demokrasi

Penegakan pilar demokrasi memiliki sasaran agar dapat terbangun dan makin memantapkan sistem demokrasi yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif, dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik. Dengan demikian, fungsi *checks and balances* dapat dilakukan secara santun, beretika, dan efektif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun justru akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga untuk menjamin setiap lima tahun terselenggara proses pemilu yang memenuhi asas-asas demokrasi yang baik yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak pilihannya secara bebas dan bertanggung jawab.

3. Program Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas, dan juga mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum.

A.4 AGENDA PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan 2012-2016, ditetapkan 4 (empat) agenda utama pembangunan nasional tahun 2012-2016, yaitu:

1. Agenda pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Agenda kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan
3. Agenda ketiga, penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.
4. Agenda empat, pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Kotawaringin Barat sebagai daerah Pengembangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.
3. Arah kebijakan umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan sumber daya aparatur yang profesional memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa Negara dan masyarakat. Percepatan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Serta mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, telah dicanangkan 4(empat) agenda pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2016. Selanjutnya dibawah ini diuraikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dari masing-masing agenda pembangunan dimaksud.

B.1 AGENDA I**(Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat)**

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu agenda terpenting dalam pemerintahan daerah Kotawaringin Barat periode Tahun 2012-2016. Hal ini mengingat bahwa sampai saat ini pencapaian kesejahteraan ekonomi belum sepenuhnya mampu mewujudkan hasil yang diinginkan. Penyebabnya antara lain proses pembangunan partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keinginan meningkatkan perekonomian daerah yang

dilandasi pada keunggulan potensi SDA dan SDM daerah belum teraktualisasi secara konkrit.

Dilandasi oleh pemikiran tersebut, agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat meliputi upaya-upaya sebagai berikut: (1) Menumbuhkembangkan pertanian agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan dengan keterkaitan yang kuat antara pertanian dan industri serta perdagangan; (2) Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pengembangan perekonomian; (3) Rehabilitasi dan peningkatan pembangunan infrastruktur pada jalur strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi; (4) Peningkatan investasi non-fisik melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di setiap bidang perekonomian unggulan daerah.

Pembangunan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran global yang semakin meningkat terhadap integrasi antara roda pembangunan dengan preservasi dan peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup agar terwujud keseimbangan, keselarasan dan keberlanjutan sistem penyangga ekosistem kehidupan.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu kawasan lingkungan hidup dalam suatu sistem meliputi fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang secara otomatis dan alami merupakan subsistem lingkungan regional, nasional dan dunia.

Oleh karenanya adalah sangat krusial dalam pembangunan daerah periode 2012-2016 untuk senantiasa melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti: peningkatan kualitas fungsi kawasan lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Wisata dan Suaka Margasatwa); Konservasi kawasan budidaya; dan AMDAL untuk setiap pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan budidaya (Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Kawasan pengembangan produksi, pemukiman dan penggunaan lainnya, areal transmigrasi, rencana areal transmigrasi, kawasan khusus, danau dan sungai).

Untuk melaksanakan Agenda I maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

- Meningkatkan PDRB dan income perkapita
- Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi
- Meningkatkan daya saing ekonomi
- Mengembangkan infrastruktur perekonomian

Sasaran

- Meningkatnya sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB
- Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
- Meningkatnya kemampuan teknis, manajerial dan permodalan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi
- Meningkatnya kerjasama antar pelaku usaha

- Keberpihakan pada usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk lokal
- Meningkatnya promosi dan pemasaran produk lokal
- Penataan pedagang kaki lima (PKL).
- Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
- Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Strategi

- Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif
- Adanya komitmen untuk berpihak pada usaha ekonomi mikro kecil dan menengah
- Memfasilitasi promosi dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal
- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana ekonomi
- Meningkatkan pemberdayaan potensi SDA dan SDM lokal berorientasi pasar secara berkelanjutan

Kebijakan

- Peningkatan pelayanan perijinan usaha
- Pengembangan pertanian berwawasan agribis
- Menumbuhkembangkan koperasi dan asosiasi-asosiasi usaha
- Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha
- Penguatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi
- Pendirian BUMD bidang perbankan/perkreditan
- Mendorong peningkatan mutu produk
- Mendorong legalitas lembaga dan sertifikasi produk lokal
- Peningkatan promosi produk unggulan daerah
- Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya
- Penataan PKL
- Peningkatan penguasaan dan apresiasi masyarakat terhadap IPTEK dan jiwa kewirausahaan.
- Peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional.
- Mempertahankan keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.
- Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestariannya.
- Pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan.
- Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik penunjang sektor-sektor perekonomian kerakyatan

B.2 AGENDA II

(Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan)

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan terus dilaksanakan di seluruh lembaga pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dan pemberantasan korupsi.

Untuk melaksanakan Agenda II maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan baik

Sasaran

- Meningkatnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Meningkatnya kedisiplinan, profesionalisme dan produktivitas aparatur
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

Strategi

- Peningkatan kapasitas aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
- Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja
- Terwujudnya pelayanan prima
- Pengembangan paradigma pembangunan dan partisipatif dan berkelanjutan

Kebijakan

- Meningkatkan tertib administrasi dan kearsipan
- Meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan produktivitas aparatur
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Menata dan mengembangkan wilayah administrative melalui pemekaran wilayah
- Meningkatkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan
- Mengupayakan peningkatan anggaran pendapatan daerah

- Meningkatkan efektifitas,efisiensi,transparansi, dan akuntabilitas anggaran belannja daerah

B.3 AGENDA III

(Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan)

Pelaksanaan pembangunan pada periode 2006-2010 telah meletakkan fondasi keadilan. Hasil yang telah dicapai antara lain tercermin pada penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya berbagai sasaran lain dalam *Millenium Development Goals (MDG's)*.

Penyelenggaraan program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan dilaksanakan seiring dengan upaya pemerataan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi.

Peningkatan pendidikan ditujukan pada upaya perluasan cakupan partisipasi anak didik, perbaikan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana penunjang pendidikan, kerjasama dengan pendidikan tinggi dan optimalisasi peran sekolah kejuruan sebagai basis pembentukan tenaga-tenaga terampil siap kerja yang dibekali dengan kemampuan mengoptimalkan potensi daerah Kotawaringin Barat. Adapun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (*resource based*), sumber daya pengetahuan (*knowledge based*) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (*culture based*).

Dalam bidang ekonomi, keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial-politik, perwujudan keadilan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Proses perencanaan yang bersifat bottom up dan inklusif telah dipraktekkan dalam beberapa program, misalnya PNPM. Masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan, pemilihan proyek hingga evaluasi. Di sini pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi komponen yang amat penting. Dengan pola ini masyarakat akan merasa lebih memiliki dan secara sukarela akan menjalankannya dan sekaligus mendapatkan manfaat dari program tersebut. Perluasan cakupan program PNPM diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan.

Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Diharapkan modal sosial masyarakat ini meningkatkan mutu proses perencanaan partisipatif di Kotawaringin Barat.

Untuk melaksanakan Agenda III maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

- Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia
- Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran
- Meningkatkan ketahanan pangan
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk
- Meningkatkan moralitas dan kepedulian sosial
- Meningkatkan peranserta masyarakat dan pengarusutamaan gender

Sasaran

- Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, murah dan merata
- Meningkatnya kesehatan lingkungan
- Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia
- Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, murah dan merata
- Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan
- Menurunnya jumlah penduduk miskin
- Menurunnya jumlah pengangguran usia produktif
- Stabilitas ketersediaan pangan masyarakat
- Meningkatnya moralitas masyarakat
- Meningkatnya kepedulian sosial
- Terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan

Strategi

- Pemenuhan standard pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan
- Meningkatkan minat dan budaya baca
- Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan
- Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan
- Peningkatan akseptor KB
- Peningkatan keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial
- Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan
- Pengarusutamaan kesetaraan gender secara proporsional

Kebijakan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan
- Meningkatkan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat untuk keluarga miskin
- Meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
- Meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah

- Meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan
- Memberdayakan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Mensinergikan berbagai program pengentasan kemiskinan
- Mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah kelurahan
- Menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat
- Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan kesalehan sosial
- Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial
- Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan
- Meningkatkan keterwakilan dan peran serta perempuan dalam sektor publik
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- Mengembangkan seni budaya, olahraga, dan peranan pemuda dan wanita.

B.4 AGENDA IV

(Penegakan Pilar Demokrasi dan Penegakan Hukum)

Wujud dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya *checks and balances*, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.

Selama ini, konsolidasi demokrasi telah dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta terus menjaga berjalannya proses *checks and balances*. Lembaga-lembaga demokrasi terus diperkuat dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum.

Demokrasi harus terus dijaga agar berada pada arah yang benar, yaitu demokrasi yang egaliter. Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi telah berhasil dilakukan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai pada tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dahulu semua masalah prosedural misalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial.

Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya "*rule of law*." Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian. Selain itu, wujud dari agenda hukum adalah menjamin proses peradilan yang bebas. Hal ini semua akan membantu di dalam upaya konsolidasi demokrasi. Penegakan hukum merupakan elemen yang sangat penting di dalam pemberantasan korupsi.

Untuk melaksanakan Agenda IV maka disusunlah serangkaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang saling terkait satu sama lain, dirumuskan berdasarkan pendekatan SMART dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan

- Menciptakan suasana yang kondusif bagi stabilitas keamanan, politik dan pemerintah

Sasaran

- Menurunnya kriminalitas dan konflik di masyarakat
- Terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan
- Berkjalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah.

Strategi

- Penciptaan suasana kondusif
- Penegakan supremasi hukum dan HAM

Kebijakan

- Penataan peraturan hukum
- Perlindungan HAM
- Konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- Menekan angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat
- Menjaga angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.
- Meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan kepada masyarakat.

C. PRIORITAS DAERAH

Program pembangunan daerah disusun berdasarkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016, selanjutnya dirumuskan kedalam program prioritas yang merupakan langkah-langkah strategis paling penting dalam rangka mencapai visi misi Bupati Kotawaringin Barat terpilih. Program yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

C.1 PRIORITAS I

(Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat)

Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya akan dicapai jika kualitas dan akses pendidikan meningkat. Pengalaman sejarah menunjukkan peningkatan akses pendidikan seluas-luasnya merupakan cara yang efektif untuk memperkecil kesenjangan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Fokus Program aksi Pendidikan adalah :

1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika.
2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD, pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau sampai dengan pendidikan 12 tahun pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Diupayakan sebelum 2016 seluruh guru telah berpendidikan S1.
5. Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
6. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
7. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.
8. Meningkatkan peran pendidikan kejuruan.

C.2 PRIORITAS II

(Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat)

Kesehatan merupakan komponen penting dalam investasi sumber daya manusia. Tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau akan mengubah perilaku manusia.

Oleh karena itu, fokus utama program bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memantapkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, maupun penataan administrasi yang transparan dan bersih.
2. Peningkatan pembudayaan pola hidup sehat
3. Menyediakan obat dalam kuantitas yang memadai
4. Meneruskan dan meningkatkan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanudin.
5. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti Posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif. Diharapkan dalam lima tahun mendatang, semua anak sudah mendapatkan vaksin DPT dan campak sehingga tingkat kematian bayi dan balita lebih cepat dari sasaran dalam MDG's.
6. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.

7. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2016
8. Revitalisasi program keluarga berencana. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini diharapkan mengubah paradigma kuantitas menjadi kualitas dalam keluarga.
9. Pengembangan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil
10. Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika profesi dan perlindungan masyarakat
11. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan carapencegahannya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban.

C.3 PRIORITAS III

(Program Penanggulangan Kemiskinan)

Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, di samping terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sejumlah intervensi yang efektif dan terarah perlu terus dilakukan.

Kebijakan diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup terpenuhinya **10 (sepuluh) hak dasar** bagi penduduk dalam menjalankan kehidupannya meliputi : (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses dan mutu layanan kesehatan, (3) akses dan mutu layanan pendidikan, (4) akses layanan air bersih, (5) kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (6) akses layanan perumahan dan sanitasi, (7) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (8) kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, (9) jaminan rasa aman dan (10) partisipasi dalam kebijakan publik.

Dengan demikian, maka program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut:

1. Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebagai inti dari program penanggulangan kemiskinan yang bercirikan program yang memberdayakan masyarakat, terdesentralisasi dan implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan lokal dengan perencanaan yang bersifat *bottom-up* pada tingkat akar.
2. Mengembangkan program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa desa tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan kemajuan yang semakin luas, melalui sektor sektor pembangunan utama, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta menumbuhkan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal.
3. Penyempurnaan data keluarga miskin dan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran akan diintegrasikan untuk semua program afirmasi dan subsidi sehingga berbagai duplikasi dapat dihindari.
4. Pemantapan dan penyempurnaan Program Jagung Hibrida yang difasilitasi pemerintah daerah meliputi penyediaan akses modal, bimbingan teknis pertanian, pengolahan hasil, sampai dengan pemasaran.

5. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan.
6. Melaksanakan dan memperkuat program nasional seperti : Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
7. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan penguatan peran dan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.

C.4 PRIORITAS IV

(Program Penciptaan Lapangan Kerja)

Empat masalah utama dalam pasar yaitu: (1) persentase sektor informal yang relatif tinggi; (2) adanya kesenjangan upah sektor formal informal; (3) penurunan produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur; dan (4) kecenderungan peningkatan pengangguran terbuka pada kelompok umur muda.

Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga 5-6% pada akhir tahun 2016, maka program ketenagakerjaan akan menekankan pada:

1. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda, dengan mengintegrasikan program prioritas ini dengan program prioritas bidang pendidikan.
2. Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.
3. Perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja.
4. Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA) untuk berinvestasi.
5. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian rakyat.

C.5 PRIORITAS V

(Program Pembangunan Infrastruktur Dasar)

Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan.
3. Melanjutkan pengembangan pelabuhan *multipurpose*, pelabuhan ro-ro, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah.
4. Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonomian daerah.

5. Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan
6. Peningkatan dan Perluasan Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
7. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

C.6 PRIORITAS VI

(Program Ketahanan Pangan)

Pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan produksi pangan beras dan bahan pangan lainnya, serta diversifikasi konsumsi pangan.

Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain:

1. Memperbaiki infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan perbaikan irigasi, saluran air, dan pelabuhan yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar.
2. Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga.
3. Menjamin pelaksanaan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan, dan penggunaan pupuksubsidi kepada yang tidak berhak.
4. Peningkatan dan penyempurnaan program Jagung Hibrida agar petani memperoleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
5. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah.
6. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian Melalui Badan Usaha Milik Daerah Agrotama Mandiri yang telah dibentuk dua tahun yang lalu.
7. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan petani melalui program peningkatan penyuluh pertanian.

C.7 PRIORITAS VII

(Program Energi)

Program dalam sektor energi diarahkan pada upaya Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga masyarakat mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya. Perhatian lebih besar ditujukan untuk menyediakan energi listrik desa desa tertinggal.

C.8 PRIORITAS VIII

(Program Tata Kelola Pemerintahan)

Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan melalui antara lain :

1. Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah.
2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (*merit based*), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sipil.

3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (*business process*), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
4. Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum.
6. Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai.

C.9 PRIORITAS IX

(Program Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi)

Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua aksi yaitu reformasi penegakan hukum (*rule of law*) dan penegakan ketertiban umum.

C.10 PRIORITAS X

(Program Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan)

Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan baik di antara kelompok masyarakat dan kelompok penghasilan, antar daerah, dan antar jender. Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi:

1. Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM termasuk dan utamanya melalui fasilitasi pemerintah daerah mengakses modal, Penguatan Bank Perkreditan Rakyat untuk membantu usaha mikro, penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha dan *entrepreneur* baru di tingkat kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat. Menciptakan kebijakan yang berpihak pada usaha kecil menengah baik dalam kebijakan produksi, distribusi, dan penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk aktivitas BUMD.
2. Mengurangi kesenjangan antar desa dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan Alokasi Dana Desa
3. Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil.
4. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan. Meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang baik dalam proses pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan.

C.11 PRIORITAS XI

(Program Lingkungan Hidup)

Program di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat.

1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai.
2. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global khususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian.
3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

C.12 PRIORITAS XII

(Program Pengembangan Budaya)

Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global:

1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan.
2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat non-komersial.
3. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional.

C.13 PRIORITAS XIII

(Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Agropolitan)

Latar belakang pelaksanaan program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan adalah bersumber dari beberapa permasalahan sistem agribisnis, yakni: (1) belum terintegrasi dan berkembang optimalnya sistem agribisnis; (2) masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem agribisnis; dan (3) kurang sesuainya model agribisnis yang dikembangkan dengan karakter masing-masing daerah pertanian akibat keterbatasan partisipasi petani dalam perencanaan model agribisnis, sisa-sisa pola pengembangan yang bersifat *top-down* yang masih dipertahankan; serta generalisasi model yang kurang tepat.

Pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sektor utama pertanian jika dilihat dari produktivitas pertaniannya yang cukup besar dan kontribusinya terhadap PDRB.

Langkah dari program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan:

1. Meningkatkan produktivitas kualitas dan produksi komoditas pertanian yang dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun untuk komoditas ekspor.
2. Mensinergikan potensi dari setiap sistem usaha agribisnis mulai dari sub-sistem hulu, on-farm, hilir, pemasaran, dan usaha penunjangnya, secara maju, berkelanjutan, dan terdesentralisasi, melalui pengembangan agropolitan yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

3. Menetapkan pusat agribisnis dan unit-unit kawasan pengembangannya yang terintegrasi dalam bentuk keterkaitan antar wilayah (pergerakan barang, modal dan manusia).
4. Menyediakan infrastruktur pendukung.

C.14 PRIORITAS XIV

(Program Peningkatan Iklim Investasi)

Perkembangan investasi pada sektor industri di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan signifikan. Namun demikian masih banyak sektor lain yang masih potensial untuk dikembangkan, sehingga sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan potensi daerah.

Salah satu kendala pelaksanaan investasi di daerah adalah adanya aturan dari pusat yang sampai saat ini masih dalam proses sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk lebih memberikan daya tarik bagi investor.

Kondisi tersebut telah menyebabkan turunnya minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan investasi, baik untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha yang telah ada maupun untuk merintis investasi baru. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas utamanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini lebih banyak didominasi oleh konsumsi daripada investasi atau ekspor.

C.15 PRIORITAS XV

(Program Penataan Ruang Wilayah)

Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

Dari sisi pengembangan wilayah, perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat memperlihatkan beberapa fenomena antara lain: belum selarasnya hubungan perkotaan dan perdesaan, ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah/disparitas yang terjadi antar wilayah.

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah.